



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG

: YUDIKATIF

LEMBAGA

: MAHKAMAH AGUNG

**UNIT KERJA** 

: PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

SUB UNIT KERJA

: PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama

: NADIRAH

2. Jabatan

: PANITERA MUDA PERKARA GUGATAN

3. NHK

: 523521

## II. DATA HARTA

|    | 100 A |     | D         | -   | 101111      |       |
|----|-------|-----|-----------|-----|-------------|-------|
| Λ. | 1 /   | МΛН | I I I I I | HAD | <b>IGUN</b> | A INI |
|    |       |     |           |     |             |       |

Rp.

450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/200 m2 di KOTA MAKASSAR

, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

## **B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp.

56.000.000

 MOBIL, TOYOTA KIJANG KAPSUL Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

6.000.000

| C. | HARTA | BERGERAK | LAINNYA |
|----|-------|----------|---------|
|    |       |          |         |

Rp.

----

D. SURAT BERHARGA

Rp.

----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

-

. HARTA LAINNYA

Rp.

506.000.000

Sub Total

III. HUTANG

Rp.

64.978.529

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

441.021.471

## Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2019



- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 14 Februari 2020.
- 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.